



LAPORAN KINERJA 2024

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVSU



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong

dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governance).

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun Anggaran. Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam bentuk LKjIP Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Medan, Januari 2025

Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara


M. ZAKIR SYARIF DAULAR, S.Hut,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19761115 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi	6
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) ORGANISASI	7
1.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	9
1.6 Dasar Hukum.....	12
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Ini.....	24
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	25
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	28
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Tidak ada)	30
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	30
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	332
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	37
3.2 Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan.....	7
Tabel 2 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	8
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah.....	15
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024.....	16
Tabel 2.3 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja.....	24
Tabel 3.2 Capaian Realisasi Kinerja Utama Tahun 2024.....	27
Tabel 3.3 Nilai Tukar Petani Sektor Perkebunan.....	27
Tabel 3.4 Nilai Tukar Petani Sektor Peternakan	28
Tabel 3.5 kemajuan Capaian Sasaran Strategis	28
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	30
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	33
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	6
--	---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang di muat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, Januari 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Laporan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, Laporan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2024.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

2. Mendorong Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sekretariat, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis sekretariat, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;

- c. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis sekretariat, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
- d. pelaksanaan administrasi teknis sekretariat, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja serta pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, penyusunan dan pelaporan keuangan Dinas;
- e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan dalam penetapan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas;
- g. menyelenggarakan program perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai tugas dan fungsi Dinas;
- h. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelayanan di kesekretariatan, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya dengan dinas/lembaga lintas Kabupaten/Kota;
- i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan tugastugas teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kesekretariatan,

- perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
- j. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Fungsional Perencana
 - c. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah
2. Kepala Bidang Perkebunan
3. Kepala Bidang Pembinaan Usaha
4. Kepala Bidang Peternakan
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Kesehatan Hewan
6. Kepala UPTD Perbenihan tipe A
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Kebun Produksi
7. Kepala UPTD Balai Inseminasi Buatan
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Produksi
 - c. Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi
8. UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Kepala Sub Bagian tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Hygiene dan Sanitasi

- c. Seksi Pangandan non Pangan
9. UPTD Klinik Hewan
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi
 - c. Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi
 10. UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi
 - c. Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi
 11. UPT Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang
 - a. Kepala Sub bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi
 - c. Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi

Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Saranan dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Saranan dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- d. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Saranan dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi

Kepegawaian

a. Jumlah Pegawai

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing unit kerja pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, maka telah ditempatkan para petugas dengan uraian pada tabel 1 dan Tabel 2

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Unit Kerja Dinas	Jumlah Aparatur								jumlah
		Struktural		Fungsional Umum		Fungsional tertentu		Honorer		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas/Sekretariat/Bidang	4	3	36	53	11	17	37	21	182
2	UPTD Perbenihan	2	2	14	9	0	2	7	0	36
3	UPTD Inseminasi Buatan	3	0	8	5	2	2	12	3	35
5	UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	1	5	6	0	2	3	4	23
6	UPTD Klinik Hewan	3	1	2	5	0	2	6	2	21

No	Unit Kerja Dinas	Jumlah Aparatur								jumlah
		Struktural		Fungsional Umum		Fungsional tertentu		Honorer		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
7	UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona	2	2	3	0	1	0	7	0	15
8	UPTD Pembibitan Ternak Ungggas dan Sapi Sihitang	3	1	2	3	3	2	8	3	25
Jumlah		19	10	70	81	17	27	80	33	337

Ket. Kondisi 31 Desember 2024

Dari tabel 2.1 yaitu Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat diketahui bahwa jumlah ASN sebanyak 337 orang yang terdiri dari aparatur struktural sebanyak 29 orang dengan rincian 19 lak-laki dan 10 perempuan, fungsional umum 151 orang dengan rincian 70 lak-laki dan 81 perempuan, dan fungsional tertentu 44 orang dengan rincian 17 laki-laki dan 27 perempuan serta pegawai honorer/tidak tetap 113 orang dengan rincian 80 lak-laki dan 33 perempuan.

b. Kualifikasi Pendidikann

Berdasarkan Tingkat Pendidikan pegawai Dias Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara seara rinci dapat dilihat pada table berikut ini ,

Tabel 2.

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024 Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu

No	Unit Kerja Dinas	PNS		PPPK		Honorer		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Strata 3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Strata 2	18	21	0	0	0	0	18	21
3	Strata 1	49	61	5	8	30	30	84	99
4	Diploma (1-4)	1	3	0	0	4	2	5	5
5	SMA/SMK/MAN	33	23	0	0	45	2	78	25
6	SMP/MTS	0	1	0	0	0	0	0	1
7	SD	1	0	0	0	0	0	1	0
Jumlah		102	109	5	8	79	34	186	151

Ket. Kondisi 31 Desember 2024

Sedangkan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024 dapat diketahui bahwa persentase pendidikan aparatur laki-laki pada umumnya lebih tinggi dari pada perempuan, namun tingkat pendidikan perempuan pada strata S2 perempuan lebih tinggi dari

pada laki-laki. Dinas Perkebunan tidak memiliki aparatur dan pegawai honorer yang berstatus tingkat pendidikan setingkat SMP/MTs dan SD.

c. Pangkat dan Golongan

Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3.
Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara

No	Unit Kerja Dinas	Jumlah	
		L	P
1	IV/d	0	0
2	IV/c	1	0
3	Pembina/IV b	4	2
4	Pembina/IV a	14	21
5	Penata Tingkat I/ III d	16	31
6	Penata/III c	24	19
7	Penata Muda Tingkat I/ III b	7	13
8	Penata Muda/ III a	9	14
9	Pengatur Tingkat I/ II d	13	8
10	Pengatur/ II c	6	4
11	Pengatur Muda Tingkat I / II b	4	0
12	Juru / I c	1	0
Jumlah		104	120

Ket. Kondisi 31 Desember 2024

1.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara, serta selaras dengan Perubahan RPJMD Tahun 2024-2026 maka permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

a. Perkebunan Rakyat

1. Produksi tanaman Perkebunan

Perkebunan rakyat masih menjadi permasalahan saat ini. Hal ini sangat terkait erat dengan tingkat produktivitas yang juga masih

sangat rendah. Produktivitas perkebunan rakyat selalu berada di bawah produktivitas perkebunan besar nasional dan perkebunan besar swasta. Semakin sedikitnya ketersediaan lahan di bidang perkebunan memberikan tantangan kepada stakeholder untuk dapat meningkatkan produktivitas perkebunan dengan melakukan program-program intensifikasi. Selain program intensifikasi, kemampuan petani dalam mengelola sub sistem *on farm* serta lemahnya kelembagaan petani menjadi alasan yang mendasar masih minimnya produktivitas perkebunan rakyat. Dengan berbagai program yang sudah dan akan dilakukan, diharapkan produktivitas perkebunan rakyat dapat mendekati produktivitas perkebunan besar baik negara maupun swasta

2. Harga jual yang berfluktuatif

Harga jual produk komoditi perkebunan masih sulit untuk dikendalikan. Harga pada komoditi-komoditi utama perkebunan mengalami fluktuasi setiap bulannya. Khusus pada komoditi karet alam, harga lump mangkok memiliki tren yang negatif. Hal ini menyebabkan pekebun mulai beralih ke komoditi dengan harga yang lebih stabil. Fluktuasi harga komoditi ini merupakan tantangan bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara untuk dapat meminimalisir fluktuasi harga yang terlalu ekstrem.

3. Kelembagaan pekebun yang lemah

Kelembagaan petani memiliki peranan penting dalam pembangunan sub sektor perkebunan. Peningkatan kemampuan manjerial serta pengaplikasian metode budidaya yang baru sebagai roda penggerak dalam pembangunan sub sektor perkebunan. Akan tetapi, kelembagaan pekebun yang memiliki peranan dalam memperbaiki hal tersebut masih belum mampu bekerja secara optimal. Pekebun masih menemui banyak permasalahan yang harus dihadapi sendiri karena lemahnya kelembagaan pekebun ini. Lemahnya kelembagaan pekebun juga berdampak kepada rendahnya posisi tawar pekebun dalam menjalankan proses produksinya. Minimnya partisipasi petani di

dalam kelompok juga menjadi alasan belum berjalan secara aktif kelembagaan pekebun tersebut.

4. Rendahnya nilai tambah dan daya saing komoditas

Produk perkebunan telah dikenal di pasar lokal dan internasional. Untuk beberapa komoditi strategis seperti kelapa sawit dan kopi, produk perkebunan dari Sumatera Utara cukup mendominasi pasar internasional. Namun, produk tersebut yang berasal dari perkebunan rakyat umumnya masih dihasilkan oleh

industri hulu dengan nilai tambah yang relatif rendah. Daya saingnya produk pun masih belum cukup tinggi karena efisiensi biaya yang rendah atau kualitas yang rendah. Hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi harga dan jumlah serta pendapatan pekebun.

b. Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Sarana Peternakan

- Ketersediaan Bibit Unggul

Belum tersedianya bibit ternak ruminansia yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas, serta masih tingginya pemotongan ternak betina produktif .

- Ketersediaan Pakan

Belum tercukupinya makanan ternak terutama hijauan yang berkualitas. Serta masih terbatasnya lahan perkebunan untuk penggembalaan yang dapat diakses oleh peternak.

2. Prasarana Pertanian

- Ketersediaan Prasarana Peternakan

Dalam rangka memajukan pembangunan pertanian diperlukan prasarana yang memadai. Hingga saat ini prasarana peternakan yang ada belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti prasarana laboratorium, pabrik pakan dan rumah kompos.

- Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM Peternakan

Masih minimnya jumlah petugas teknis lapangan (Penyuluh, Inseminator, Petugas kecamatan, petugas kesmavet, petugas kesehatan hewan dan petugas teknis lainnya) serta masih

rendahnya kualitas sumberdaya manusia pelaku utama pembangunan peternakan dan kesehatan hewan masih menjadi masalah dalam memajukan pembangunan peternakan di Sumatera Utara.

- Keterbatasan Modal
Terbatasnya modal pelaku utama pembangunan peternakan serta pada sisi lain fasilitas kredit dari lembaga keuangan sulit diperoleh.

3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Hewan Veteriner

Masih adanya kasus kesehatan hewan terutama penyakit hewan menular strategis.

1.6 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja

ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama Organisasi dan Sistematika Penulisan LKjIP.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi
	Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
	3.2 Realisasi Anggaran
	Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV	PENUTUP
	Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN	
1	Perjanjian Kinerja.
2	Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Laporan Kinerja Tahun ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Utara serta memperhatikan masalah, tantangan, potensi, dan peluang yang tersedia, maka tujuan pembangunan perkebunan dan peternakan yaitu peningkatan kesejahteraan petani sub sektor perkebunan dan peternakan.

Mengacu pada tujuan pembangunan perkebunan dan peternakan tersebut maka sasaran pembangunan perkebunan dan peternakan Sumatera Utara 2024- 2026 yang akan dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan petani sub sektor perkebunan dan peternakan. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Renstra 2024-2026								
1	Peningkatan Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pekebun dan Peternak	1 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	100,51	154,19	156,11	159,93	163,76
			2 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Peternakan (Poin)	116,02	116,81	101,51	102,01	102,51

Sumber : P. Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Perkebunan dan Peternakan	1. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	Rasio antara indeks harga a yang diterima petani/ peternak (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib).	$NTP = (It/Ib) \times 100$	Badan Pusat Statistik
		2. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan (Poin)	Rasio antara indeks harga yang diterima petani/peternak (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani/peternak (Ib).	$NTP = (It/Ib) \times 100$	Badan Pusat Statistik

Sumber: IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara 2024

2.1.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Dinas Perkebunan dan Peternakan pada Renja Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 7 (tujuh) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan yang keseluruhannya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai Berikut :

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Penataan Prasarana Pertanian
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Penataan Prasarana Pertanian
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kesejahteraan Hewan
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Total anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara bersumber dari APBD Provinsi untuk 6 (enam) program utama yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis di targetkan sebesar Rp. 90.737.594.803 terdiri dari :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp. 25.769.151.277
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp. 2.181.292.972
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp. 2.543.505.582
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp. 345.689.450

5. Program Perizinan Usaha Pertanian Rp. 35.504.750

6. Program Penyuluhan Pertanian Rp. 2.952.801.868

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu peningkatan kesejahteraan petani sektor perkebunan dan peternakan meningkatnya kesejahteraan petani Pekebun dan Peternak dengan sasaran peningkatan pendapatan petani perkebunan dengan sasaran peningkatan produksi tanaman utama perkebunan maka disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.3 Target Perjanjian Kinerja
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1.	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan rakyat (%)	2,57
		2.	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (%)	2,32
2	Meningkatnya Produksi Ternak	3.	Persentase Peningkatan Produksi Daging (%)	1,28
		4.	Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	2,16
		5.	Persentase Peningkatan Produksi Susu (%)	2,90
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternakan	6.	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	156,11
		7.	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	101,51
		8.	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB) (%)	13,33

Dikarenakan adanya perubahan Indikator Kinerja Dinas hasil asistensi dengan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dimana disampaikan Indikator Kinerja Dinas merupakan indikator dari tujuan dinas. Maka disusunlah Perubahan Indikator Kinerja (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel.6
Taget Perjanjian Kinerja
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu Tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Perkebunan dan Peternakan	Terwujudnya peningkatan Petani i Perkebunan dan Peternakan	1.Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	156,11
			3.Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan (Poin)	101,51

Kemudian disusun Perjanjian Kinerja OPD Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	156,11	
2.	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan (Poin)	101,51	



PERUBAHAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2024



Untuk mewujudkan pencapaian IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, selain sumber dana APBD juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN yaitu dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Gambaran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran menjadi ukuran kinerja dapat dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel berikut :

Tabel. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Ini

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Perkebunan dan Peternakan	1 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	156,11	182,87	117,14	Sangat Baik
		2 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan (Poin)	101,51	95,40	93,38	Sangat Baik

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara 2024

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 memiliki 1 (satu) sasaran strategis serta 2 (dua) indikator kinerja utama. Dari kedua indikator kinerja utama tersebut terdapat satu indikator utama yang tidak mencapai target yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Peternakan. Sedangkan indikator kinerja utama lainnya yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Perkebunan sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Evaluasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2024-2 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024
Terhadap Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Perkebunan dan Peternakan	1 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	152,28	159,89	156,11	182,87	117,14
		2 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan (Poin)	101,13	96,81	101,51	95,40	93,38

Sumber : Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan perbandingan capaian realisasi indikator kinerja tahun 2024 terhadap beberapa tahun terakhir masing-masing indikator sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis 1: Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Perkebunan dan Peternakan
 1. Indikator kinerja: Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan (Poin)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator kesejahteraan petani, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). Mulai Januari 2020, penyusunan NTP menggunakan tahun dasar 2018=100.

Arti angka NTP adalah sebagai berikut :

- 1) $NTP > 100$, petani mengalami surplus. Hal ini terjadi ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.
- 2) $NTP = 100$, petani tidak mengalami impas/break even. Hal ini terjadi ketika perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.
- 3) $NTP < 100$, petani mengalami defisit. Hal ini terjadi ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.

Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2024 sampai dengan bulan Desember dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.3
Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Perkebunan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Bulan	Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Perubahan NTP
Januari	197,00	118,41	166,37	-0,10
Februari	200,44	119,17	168,20	1,10
Maret	208,22	120,46	172,85	2,76
April	211,85	120,50	175,81	1,72
Mei	209,06	120,77	173,10	-1,54
Juni	211,16	120,70	174,94	1,06
Juli	214,27	119,87	178,75	2,18
Agustus	220,40	119,78	184,00	2,93
September	225,33	119,27	188,94	2,68
Oktober	233,64	119,26	195,90	3,69
November	246,84	119,52	206,53	5,42
Desember	252,43	120,72	209,09	1,24
Rerata	219,22	119,87	182,87	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (diolah), 2024

Pencapaian NTP Perkebunan sepanjang tahun 2024 menunjukkan trend yang baik dimana setiap bulannya mengalami peningkatan. Pada akhir Tahun Anggaran 2024, capaian NTP sub sektor perkebunan sudah mencapai 182,87 poin dimana capaian ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 156,11 atau (117,14). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.
Perkembangan Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan Tahun 2021-2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		Persentase Pencapaian (%)	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
		Target	Capaian				
Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Perkebunan dan Peternakan	Nilai Tukar Petani Rakyat (NTPR) Perkebunan	156,11	182,87	117,14	109,18	152,28	159,89

2. Indikator kinerja : Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Peternakan (Poin)

Pencapaian NTP Peternakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 masih mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2021 NTP Peternakan telah mencapai 103,06 poin kemudian turun menjadi 101,13 poin pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 96,81 point dimana capaian ini kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 116,81 atau 98,81%. Sedangkan NTP Peternakan pada tahun 2024 juga mengalami penurunan menjadi 95,40 poin atau 93,98 % dari target NTP Peternakan yang ditetapkan sebesar 101,51 poin. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh dampak pasca Covid-19 serta isu global lainnya yang membuat penerimaan peternak dari hasil produksi lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi rumah tangganya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. Perkembangan Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan Tahun 2021-2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		capaian (%)	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
		Target	Capaian				
Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Perkebunan dan Peternakan	Nilai Tukar Petani Rakyat (NTPR) Peternakan	101,51	95,40	93,98	103,06	101,13	96,81

Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan tahun 2024 sampai dengan bulan Desember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.4 Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Bulan	Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Perubahan NTP
Januari	110,82	116,20	95,37	0,75
Februari	111,46	117,22	95,08	-0,30
Maret	112,36	118,38	94,91	-0,18
April	114,10	118,56	96,24	1,40
Mei	114,46	119,09	96,11	-0,13
Juni	114,46	119,26	95,97	-0,14
Juli	112,74	118,65	95,01	-1,00
Agustus	112,72	118,61	95,03	0,02
September	112,78	118,36	95,29	0,27
Oktober	112,68	118,25	95,29	0,01
November	112,82	118,69	95,05	-0,25
Desember	114,45	119,93	95,43	0,40
Rerata	112,99	118,43	95,40	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (diolah) tahun 2024

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
1	Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Perkebunan dan Peternakan	1 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	182,87	159,89	1,11 %
		2 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan (Poin)	95,40	96,81	0,98

Sumber : Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas dapat dijelaskan masing-masing capaian indikator kinerja sebagai berikut:

b. Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Perkebunan dan Peternakan

1. Indikator kinerja: Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Perkebunan

Pada Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Perkebunan dapat di jelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target pada akhir tahun Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara (Tahun 2024). Capaian NTP Perkebunan tahun 2024 sudah memenuhi dengan target pada akhir tahun Renstra yaitu 182,87 point dengan tingkat kemajuan 1,11%.

2. Indikator kinerja: Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Peternakan (poin)

Pada Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Peternakan dapat di jelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target pada akhir tahun Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara (Tahun 2024). Capaian NTP Peternakan tahun 2024 belum memenuhi dengan target pada akhir tahun Renstra yaitu 95,40 point. Capaian NTP Peternakan yaitu sebesar 96,81 poin, untuk itu dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak untuk mendongkrak NTP Peternakan di tahun 2025.

Secara umum, salah satu penyebab tidak optimalnya capaian NTP sektor Peternakan di tahun 2024 adalah cukup besarnya pengeluaran peternak / masyarakat di sektor peternakan untuk kebutuhan sehari – hari akibat meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok serta untuk biaya produksi usaha peternakan mereka. Walaupun secara umum pendapatan peternak / masyarakat di sektor peternakan pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan pengeluaran mereka yang ditunjukkan dengan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 112,99 poin berbanding dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang sebesar 118,43 poin. Kedepannya strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu masyarakat dalam

menghadapinya adalah dengan memberikan bantuan berupa bibit ternak unggas kepada kelompok tani ternak serta penyediaan skim kredit usaha melalui dan KUR peternakan serta asuransi ternak.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Tidak ada)

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan*	Solusi yang dilakukan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Perkebunan dan Peternakan	1 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	156,11	182,87	117,14		
		2 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan (Poin)	101,51	95,40	93,38		

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

*) Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang dilakukan diuraikan dalam penjelasan

Analisis keberhasilan, kegagalan masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja yaitu Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Perkebunan dan Peternakan. Pada sasaran strategis ini, Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor perkebunan sudah mencapai target yang ditetapkan. Untuk lebih meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor perkebunan. Adapun kendala yang dihadapi yaitu masih banyaknya komoditas tanaman utama perkebunan tua rusak (TTR) sehingga menurunnya produktivitas, menyebabkan jumlah produksi berkurang. Selain itu adanya peremajaan kebun kelapa sawit melalui program Peremajaan Kelapa Sawit (PRS) sehingga berkurangnya jumlah

produksi (tanaman belum menghasilkan).

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan rakyat dalam mencapai keberhasilan kinerja OPD dilakukan strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan dengan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi perkebunan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan benih, pupuk, dan peralatan pasca panen.

Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya pendapatan petani pekebun. Pada sasaran strategis ini, Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor perkebunan sudah mencapai target yang ditetapkan. Untuk indikator PDRB sub sektor perkebunan juga sudah mencapai target yang ditetapkan. Untuk lebih meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor perkebunan dan PDRB sub sektor perkebunan dilakukan strategi antara lain penyusunan standar pelayanan publik pemberian usaha; penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha; pembinaan dan pengawasan ijin usaha; pengembangan kompetensi penyuluh; diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi; penyuluhan dan pemberdayaan petani; dan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani; serta pendampingan manajemen korporasi petani.

Pada indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor peternakan terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi masih terjadinya kasus-kasus penyakit menular serta isu global lainnya yang membuat penerimaan peternak dari hasil produksi lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi rumah tangganya. Untuk meningkatkan NTP sub sektor peternakan dilakukan pembinaan dan pengawasan ijin usaha; pengembangan kompetensi petani, penyuluhan dan pemberdayaan petani serta Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengetahui Untuk mengetahui penggunaan sumber daya pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dalam pencapaian IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Realisasi IKU	% Capaian IKU	Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Anggaran			
							Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Perkebunan dan Peternakan	1	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	156,11	182,87	117,14	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN	33.827.945.899	31.867.121.178	96,18
		2	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan (Poin)	101,51	95,4	93,38	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	17.462.534.637	17.132.984.942	98,11
							Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.170.208.067	2.987.982.650	94,25
							Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	7.125.528.650	7.044.953.760	98,87
							Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	7.130.339.920	7.063.734.932	99,07
							Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	36.458.000	36.313.600	99,60
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	606.988.400	600.787.124	98,98
							Penataan Prasarana Pertanian	606.988.400	600.787.124	98,98
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.128.225.906	1.044.368.266	92,57
							Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.128.225.906	1.044.368.266	92,57
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	345.689.450	344.730.280	99,72

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Realisasi IKU	% Capaian IKU	Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Anggaran		
							Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	345.689.450	344.730.280	99,72
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	35.504.750	35.457.150	99,87
						Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.504.750	35.457.150	99,87
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.952.801.868	1.825.350.754	61,82
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	497.150.388	474.618.288	95,47
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	2.455.651.480	1.350.732.466	55,01
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	52.587.000	47.936.715	91,16
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	52.587.000	47.936.715	91,16
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.574.304.572	1.543.762.759	98,06
						Penataan Prasarana Pertanian	1.574.304.572	1.543.762.759	98,06
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.277.302.454	2.196.116.464	96,43
						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.277.302.454	2.196.116.464	96,43
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	491.562.333	434.187.518	88,33

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Realisasi IKU	% Capaian IKU	Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Anggaran		
							Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	433.461.333	376.086.518	86,76
						Kesejahteraan Hewan	58.101.000	58.101.000	100,00
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	923.717.343	828.760.929	89,72
						Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	923.717.343	828.760.929	89,72
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.957.913.271	1.915.022.853	97,81
						Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.957.913.271	1.915.022.853	97,81
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.018.813.915	3.917.655.424	97,48
						Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.018.813.915	3.917.655.424	97,48

Sumber : Perjanjian Kinerja dan DPA Disbunak

Sajian Tabel diatas, pelaksanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- a. Total Pagu anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 semula sebesar Rp.98.020.138.511,- setelah perubahan pada APBD-P menjadi sebesar Rp.90.737.594.803,- dengan rincian anggaran untuk non urusan sebesar Rp. 56.909.648.904,- dan anggaran untuk pencapaian IKU sebesar Rp.33.827.945.899,-
- b. Realisasi pelaksanaan Urusan untuk pencapaian IKU dana APBD untuk program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dengan pagu sebesar Rp. 33.827.945.899,- terealisasi Rp.31.867.121.178,- atau 94.20%.
- c. Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian IKU berdasarkan target Renja Tahun 2024 sebagai berikut :
 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan predikat kinerja *Sangat Tinggi* hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 97,69% dan fisik sebesar 100 %.
 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan predikat kinerja *Tinggi* hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 96,62% dan fisik sebesar 100%
 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan predikat kinerja *Sangat Tinggi* hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 99,11 % dan fisik sebesar 100%
 4. Program Penyuluhan Pertanian dengan predikat kinerja *Tinggi* hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 93,06% dan fisik sebesar 100%.
 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan predikat kinerja *Sangat Tinggi* hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 95,74% dan fisik sebesar 187,33%
 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan predikat kinerja *Tinggi* hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan

sebesar 95,50% dan fisik sebesar 194,00%

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan predikat kinerja Tinggi hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 96,52% dan fisik sebesar 115,85% .

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 dianggarkan melalui sumber dana APBD dan APBN baik dana alokasi Tugas Pembantuan (TP) maupun Dekonsentrasi. Adapun faktor-faktor program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara antara lain , sebagai berikut :

- Tersedianya Sumberdaya manusia (ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan) yang telah melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat (Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel)
- Potensi sumberdaya tanaman perkebunan masih dapat ditingkatkan;
- Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
- Meningkatnya kebutuhan bahan pangan;
- Adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari dana BPDPKS
- Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pengentasan kemiskinan.
- Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan capaian program/kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran antara lain sebagai berikut :

- Masih banyaknya komoditas tanaman utama perkebunan tua rusak (TTR) sehingga menurunnya produktivitas, menyebabkan jumlah produksi berkurang
- Adanya intrusi air laut ke lahan perkebunan kelapa petani sehingga banyak tanaman kelapa mati
- Adanya peremajaan kebun kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara melalui program Peremajaan Kelapa Sawit (PRS) sehingga berkurangnya jumlah produksi (tanaman belum menghasilkan)
- Kurangnya pelatihan bagi aparat/ASN penyelenggara pembangunan perkebunan

- Sarana dan prasarana perkebunan belum memadai
- Penerapan teknologi terbatas untuk memperoleh informasi

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 pagu awal/murni Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.98.020.138.511,- dan mengalami perubahan pada APBD Perubahan menjadi Rp.90.737.594.803,-. Pelaksanaan program perkebunan dilaksanakan melalui 7 Program dan 26 Kegiatan dan 45 sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.87.272.616.627,- (96,18%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Adapun capaian realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan TA. 2024

No	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		Realisasi Fisik	
				(Rp.)	(%)	Target	(%)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN	98.020.138.511	90.737.594.803	87.272.616.627,40	96,18		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	56.556.339.053	56.909.648.904	55.405.495.449,40	97,36	100%	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.359.496.585	1.050.866.345	1.029.237.751	97,94	12 Bulan	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	446.413.715	392.612.965	387.781.993	98,77	7 Dokumen	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	913.082.870	658.253.380	641.455.758	97,45	5 Laporan	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.402.038.430	38.663.283.763	37.334.384.771	96,56	12 Bulan	75
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.629.984.430	37.891.229.863	36.578.923.853	96,54	250 Orang/Bulan	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	133.770.000	638.283.900	622.175.800	97,48	1 Dokumen	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	638.284.000	133.770.000	133.285.118	99,64	1 Dokumen	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.998.080	72.998.080	72.965.950	99,96	12 Bulan	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	92.998.080	72.998.080	72.965.950	99,96	1 Dokumen	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	879.372.180	643.367.180	637.260.000	99,05	12 Bulan	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	256.044.000	228.000.000	226.860.000	99,50	4 Paket	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	463.097.180	415.367.180	410.400.000	98,80	250 Orang	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160.231.000	-	-	#DIV/0!	0 Orang	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.074.199.852	1.787.763.112	1.784.040.442	99,79	12 Bulan	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.937.890	46.937.890	46.906.890	99,93	12 Paket	100

No	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		Realisasi Fisik	
				(Rp.)	(%)	Target	(%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	728.847.230	517.437.590	516.152.516	99,75	3 Paket	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.942.200	56.911.100	56.899.900	99,98	2 Paket	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	44.640.000	44.640.000	44.640.000	100,00	10080 Dokumen	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	704.000.000	510.004.000	509.852.886	99,97	0 Laporan	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	447.832.532	611.832.532	609.588.250	99,63	0 dokumen	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.582.897.481	1.584.644.429	1.546.380.000	97,59	12 Bulan	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.582.897.481	1.584.644.429	1.546.380.000	97,59	100 Unit	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.606.789.000	9.612.286.000	9.540.862.926	99,26	12 Bulan	75
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	687.000.000	686.132.526	99,87	1 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.906.789.000	8.925.286.000	8.854.730.400	99,21	1 Laporan	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.558.547.445	3.494.439.995	3.460.363.609	99,02	12 Bulan	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	599.688.070	505.080.620	504.477.962	99,88	20 Unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.750.000	109.250.000	109.250.000	100,00	120 Unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.880.109.375	2.880.109.375	2.846.635.647	98,84	5 Unit	100
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	20.752.703.827	17.462.534.637	17.132.984.942	98,11	1300 Ha	100
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.067.333.811	3.170.208.067	2.987.982.650	94,25	1300 Ha	100
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.067.333.811	3.170.208.067	2.987.982.650	94,25	1 Laporan	100
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5.289.091.450	7.125.528.650	7.044.953.760	98,87	1300 Ha	100
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	5.289.091.450	7.125.528.650	7.044.953.760	98,87	1 Laporan	100
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	11.199.065.992	7.130.339.920	7.063.734.932	99,07	20%	100
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	11.074.066.202	7.077.991.980	7.011.629.992	99,06	1Laporan	100
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	124.999.790	52.347.940	52.104.940	99,54	1000 Dokumen	100
	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	197.212.574	36.458.000	36.313.600	99,60	15 Unit	100

No	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		Realisasi Fisik	
				(Rp.)	(%)	Target	(%)
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	197.212.574	36.458.000	36.313.600	99,60	1 Laporan	100
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	984.933.640	606.988.400	600.787.124	98,98	1,50%	100
	Penataan Prasarana Pertanian	984.933.640	606.988.400	600.787.124	98,98	0 Unit	100
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	984.933.640	606.988.400	600.787.124	98,98	1 Ha	100
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.916.225.301	1.128.225.906	1.044.368.266	92,57	10%	100
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.916.225.301	1.128.225.906	1.044.368.266	92,57	74500 Ekor	100
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	296.100.495	89.626.000	86.757.660	96,80	1 Wilayah	100
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.620.124.806	1.038.599.906	957.610.606	92,20	1 Laporan	100
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.119.098.862	345.689.450	344.730.280	99,72	1000 Ha	100
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.119.098.862	345.689.450	344.730.280	99,72	1000 Ha	100
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	580.147.450	305.673.550	304.944.380	99,76	500 Ha	100
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	295.281.788	15.888.900	15.675.900	98,66	200 Ha	100
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	243.669.624	24.127.000	24.110.000	99,93	200 Ha	100
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	59.999.750	35.504.750	35.457.150	99,87	10%	100
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.999.750	35.504.750	35.457.150	99,87	500 Unit	59,52
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	59.999.750	35.504.750	35.457.150	99,87	1 Laporan	100
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.721.960.358	2.952.801.868	1.825.350.754	61,82	10%	100
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	948.860.868	497.150.388	474.618.288	95,47	15 Kegiatan	100
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	948.860.868	497.150.388	474.618.288	95,47	12 Dokumen	100
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	2.773.099.490	2.455.651.480	1.350.732.466	55,01	20 Kelompok	100
	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	2.673.099.690	2.378.148.580	1.273.461.146	53,55	1 Unit	100

No	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		Realisasi Fisik	
				(Rp.)	(%)	Target	(%)
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	99.999.800	77.502.900	77.271.320	99,70	7 Unit	100
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	139.792.000	52.587.000	47.936.715	91,16	1300 Ha	100
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	139.792.000	52.587.000	47.936.715	91,16	8 Unit	100
	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	139.792.000	52.587.000	47.936.715	91,16	1 laporan	100
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.990.164.456	1.574.304.572	1.543.762.759	98,06	401 Ha	100
	Penataan Prasarana Pertanian	1.990.164.456	1.574.304.572	1.543.762.759	98,06	17 Unit	100
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.990.164.456	1.574.304.572	1.543.762.759	98,06	1 Dokumen	100
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.234.304.331	2.277.302.454	2.196.116.464	96,43	2,11%	100
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.234.304.331	2.277.302.454	2.196.116.464	96,43	40%	100
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.234.304.331	2.277.302.454	2.196.116.464	96,43	1 Laporan	100
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	965.307.892	491.562.333	434.187.518	88,33	10%	100
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	735.418.582	433.461.333	376.086.518	86,76	540 Sampel	100
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	203.539.332	94.556.622	94.525.622	99,97	200 Laporan	100
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	531.879.250	338.904.711	281.560.896	83,08	1 Dokumen	100
	Kesejahteraan Hewan	229.889.310	58.101.000	58.101.000	100,00	102 Unit Usaha	100
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	203.539.332	58.101.000	58.101.000	100,00	10 Sertifikat	100
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	806.563.243	923.717.343	828.760.929	89,72	7%	100
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	806.563.243	923.717.343	828.760.929	89,72	4000 Ekor	100
	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	806.563.243	923.717.343	828.760.929	89,72	1 Laporan	100
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.171.292.969	1.957.913.271	1.915.022.853	97,81	2,11%	100

No	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)		Realisasi Fisik	
				(Rp.)	(%)	Target	(%)
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.171.292.969	1.957.913.271	1.915.022.853	97,81	80%	100
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.171.292.969	1.957.913.271	1.915.022.853	97,81	1 laporan	100
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.601.452.829	4.018.813.915	3.917.655.424	97,48	2,11%	100
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.601.452.829	4.018.813.915	3.917.655.424	97,48	70%	100
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.601.452.829	4.018.813.915	3.917.655.424	97,48	1 laporan	100

Sumber : Laporan Keuangan Disbunak 2024

Jumlah anggaran dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai sasaran strategis pada tahun 2024 dipandang cukup efektif dengan memberikan hasil yang baik. Hal ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk terus saling bekerja sama dan saling mendukung dalam kemajuan pembangunan perkebunan dan peternakan di Sumatera Utara pada tahun-tahun mendatang.

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dengan anggaran (APBD murni) sebesar Rp. 11.198.065.992,- karena adanya efisiensi menjadi sebesar Rp. 7.130.339.920 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.063.734.932,- (99,07%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Adapun rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Bidang Peternakan)

Pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Bidang Peternakan) anggaran (APBD-Murni) sebesar Rp. 11.074.066.202,- setelah perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 7.077.991.980,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.011.629.992,- (99,06%) dan realisasi fisik

sebesar 100 %. Adapun rincian sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemberian bantuan bibit ternak kepada kelompok tani/ternak berupa bibit ayam 10 kelompok ($400 \times 10 = 4000$), itik kelompok ($400 \times 10 = 4000$), domba 15 kelompok ($20 \times 15 = 300$), kambing 15 kelompok ($20 \times 15 = 300$), sapi 22 kelompok ($10 \times 22 = 220$) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.077.991.980,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.011.629.992,- (99,06%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

2. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan (Bidang Peternakan)

Pelaksanaan sub kegiatan Penjaminan peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan (Bidang Peternakan) anggaran anggaran (APBD-Murni) sebesar Rp. 124.999.790,- setelah perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 52.347.940,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.52.104.940,- (99,54%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Adapun rincian sebagai berikut :

- a. Pengambilan dan Pengujian sampel pakan ternak ke Kelompok dan UPTD yang Difasilitasi

3. Pengawasan Mutu Dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

Pelaksanaan sub kegiatan pengawasan mutu dan peredaran benih hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan (Bidang Perkebunan) anggaran anggaran (APBD-Murni) sebesar Rp. 5.289.091.450,- setelah perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 7.125.528.650 (99,54 %) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.044.953.760 dan realisasi fisik 100 % dengan kegiatan penyerahan bantuan benih kopi, ke kelompok tani ke beberapa kabupaten seperti, Simalungun, Asahan, Labusel



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara 2024 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara 2024 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran, dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Dari sasaran strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara terdapat 1 (satu) Indikator yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Sasaran strategis yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara peningkatan kesejahteraan petani sub sektor perkebunan dan peternakan. Pada sasaran strategis ini, indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Perkebunan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 182,87 poin. Indikator yang kedua yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Peternakan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 95,40 poin atau 99,38%, namun sudah menunjukkan peningkatan sebesar 1,06%.

Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat menjadi Pertanggungjawaban kepada pemberi wewenang dan masyarakat. LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

Medan, Januari 2025

Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara



M. ZAKIR SYARIF DAULA, S.Hut,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197611152001121003

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provsu Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. ZAKIR SYARIF DAULAY, S.Hut.,MM
Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

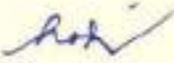
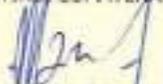
Nama : HASSANUDIN
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

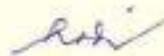
Medan, **26 MARET** 2024

Pihak Kedua, Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,  HASSANUDIN	Pihak Kesatu, KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA,  M. ZAKIR SYARIF DAULAY, S.Hut.,MM PEMBINA UTAMA MUJDA NIP 197611152001121003
---	---

4	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp	3.688.096.436	APSD
5	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp	1.119.096.862	APSD
6	Perizinan usaha pertanian	Rp	59.999.750	APSD
7	Penyuluhan Pertanian	Rp	3.771.960.036	APSD

TOTAL Rp **98.020.138.511**

PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



HASSAMUDIN

Medan, 26 MARET 2024

KEPALA DINAS PERNEBUHAN DAN
PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,



M. ZAKI SYARIF DALAY, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197811152001128003

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provsu Tahun 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. ZAKIR SYARIF DAULAY, S.Hut.,MM
Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Drs. A. FATONI, M.Si
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

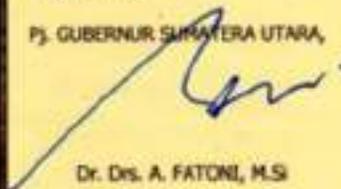
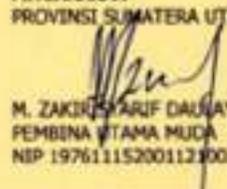
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 08 Agustus 2024

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA, KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si M. ZAKIR SYARIF DAULAY, S.Hut.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197611152001121003

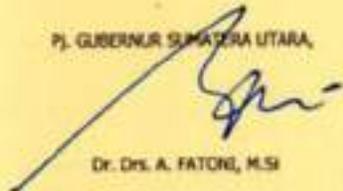
**LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

Peringkat Daerah : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SAGARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatnya kesejahteraan petani perkebun dan peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor tanaman perkebunan (point)	156,11
		Nilai Tukar Petani (NTP) sektor peternakan (point)	101,51

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 56.171.549.263	APBD
2. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp. 22.296.335.602	APBD
3. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp. 2.631.977.856	APBD
4. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp. 1.005.807.736	APBD
5. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp. 856.303.350	APBD
6. Perizinan usaha pertanian	Rp. 59.999.750	APBD
7. Penyuluhan Pertanian	Rp. 3.477.536.018	APBD
TOTAL	Rp. 88.493.509.575	

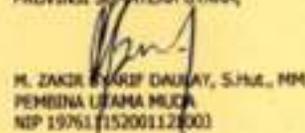
PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Medan, 06 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,



M. ZAKIR HARIF DAUAY, S.Hut., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197611152001120003

Lampiran 2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. ZAKIR SYARIF DAULAY, S.Hut., MM
Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DR. Drs. A. FATONI, M.Si
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

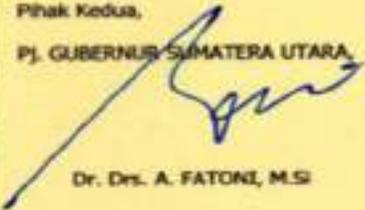
Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2024

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA, KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si M. ZAKIR SYARIF DAULAY, S.Hut., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19761115200111003

**LAMPERAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebun dan Peternak	1 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	156,11
		2 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan (Poin)	101,51

Program		Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp 25.768.131.277	P. APBD
2	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp 2.181.292.972	P. APBD
3	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp 2.543.505.582	P. APBD
4	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp 345.689.450	P. APBD
5	Perizinan usaha pertanian	Rp 35.504.750	P. APBD
6	Penyuluhan pertanian	Rp 2.952.801.868	P. APBD
TOTAL		Rp 33.827.945.899	

PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Medan, 2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

M. ZAKIR SYARIF DALAY, S.Hut.,MM
PEMBINA UTAMA BUDA
NIP 19761115200121003



**LAPORAN KINERJA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2024**